

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Situasi dunia yang mulai berkembang saat ini menuju peningkatan isu kesetaraan, mengurangi kemiskinan, korupsi, dan tekanan lingkungan. Keadaan tersebut meningkatkan kesadaran pentingnya pengungkapan sosial dan lingkungan sebagai jaminan terhadap kesalahan manajemen dan jaminan transparansi perusahaan yang lebih tinggi dalam operasional perusahaan serta dapat menarik para investor (Arayssi *et al.*, 2020). Sejak itu *Global Reporting Intuitive* (GRI) diperkenalkan sebagai pelaporan keberlanjutan yang berfokus pada pengungkapan non-keuangan. GRI mencakup kinerja lingkungan, sosial dan tata kelola yang membantu perusahaan membuat strategi keberlanjutan dan membantu pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kinerja keberlanjutan perusahaan (Buallay & Al-Ajmi, 2020). Pelaporan berkelanjutan yang berbasis GRI dinilai melibatkan pemangku kepentingan dalam pendekatan penetapan standar maupun audiens yang dituju dan memuaskan keinginan untuk memahami pengaruh aktivitas organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, masyarakat, dan manusia secara holistik (Zaid & Issa, 2023).

Oleh karena itu, aspek keberlanjutan perlu diterapkan pada setiap perusahaan. Hal tersebut bisa menjadi sebagai penjamin bagi para investor untuk melindungi dari tindakan manajemen perusahaan yang merugikan perusahaan Keberlanjutan memiliki 3 aspek yaitu pertama, lingkungan (*environment*) mencakup aspek terkait emisi, mitigasi/pencegahan, dan keberlanjutan perubahan iklim. Kedua, sosial

(*social*) berkaitan pada bagaimana suatu organisasi memperlakukan komunitas, karyawan, dan pelanggannya serta tanggungjawab terhadap produk dan jasa, *diversity*, pemberantasan korupsi, dan menghormati HAM. Ketiga, tata kelola (*governance*) dengan tujuan untuk menyeimbangkan *stakeholder* dan *shareholder* serta berpegang pada praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan (Fuadah *et al.*, 2022).

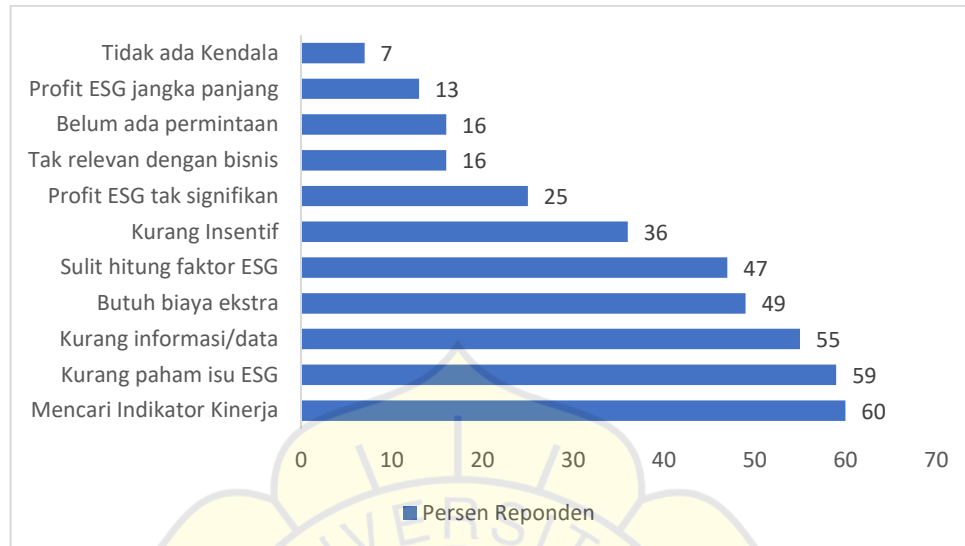
Namun ternyata terdapat faktor yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruhnya terhadap *ESG disclosure* yaitu ketika perusahaan memiliki keterkaitan dengan faktor politik. Penilaian koneksi politik dimata masyarakat umum dipersepsikan sebagai kepentingan yang berkonotasi negatif. Namun ternyata dengan perusahaan yang terhubung secara politik yang mana peran pemerintah akan cenderung mempengaruhi perusahaan dalam pengungkapan laporan keberlanjutan agar sejalan dengan orientasi pembangunan sehingga perusahaan juga terus berkomitmen untuk berkontribusi terhadap pencapaian perbaikan melalui *ESG disclosure* (Darwis *et al.*, 2019). Selain itu, perusahaan juga mendapatkan banyak manfaat bila terkoneksi dengan pemerintah seperti dapat menikmati tingkat deteksi penipuan yang lebih rendah, mendapatkan informasi secara langsung mengenai UU dan kebijakan hal ini dilakukannya untuk memperoleh dana talangan dari pemerintah maupun mendapatkan perlindungan politik (Ali *et al.*, 2022). Perusahaan yang berafiliasi dengan pemerintahan memiliki visibilitas politik yang lebih besar karenanya mereka perlu menunjukkan lebih banyak pengungkapan laporan berkelanjutan seperti *ESG* karena pemerintah akan berusaha melegitimasi kondisi stabilitas ekonomi dan politik di suatu negara dengan menunjukkan bahwa

kegiatan perusahaan yang terafiliasi dengan pemerintah bersifat berkelanjutan (Saraswati et al., 2020), hal ini dianggap menjadi cara perusahaan yang berkaitan dengan pemerintah akan mendapat pengakuan legitimasi oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat (Sutawan & Sisdyani, 2022). Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha mewujudkan keinginan masyarakat sehubungan dengan pengungkapan *ESG* yang diterbitkan oleh perusahaan dengan begitu perusahaan akan berusaha mengungkapkan indikator kinerja *ESG* lebih banyak untuk memenuhi keinginan para investor (Juwono & Mayangsari, 2022).

Praktik *ESG disclosure* di Indonesia sendiri telah mendapat dukungan pemerintah melalui peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk mengambil tanggung jawab lingkungan, sosial, dan tata kelola guna memenuhi legitimasi dan memenuhi harapan pemangku kepentingan yaitu peraturan otoritas jasa keuangan No 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan terbuka (Setyahuni & Handayani, 2020). Keuangan berkelanjutan dipraktikkan dengan komitmen untuk meminimalkan konsekuensi perubahan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Keuangan berkelanjutan melibatkan pergeseran fokus dari maksimalisasi keuntungan ke maksimalisasi peningkatan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan serta tata kelola perusahaan untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Namun peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan oleh badan pengatur yaitu pemerintah, tidak membuat perusahaan Indonesia tunduk untuk melakukan kegiatan operasionalnya dengan baik dan memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan (Vivianita et al., 2022).

Hal tersebut didukung dengan riset yang oleh IBCSD tahun 2021 menunjukkan kurangnya pemahaman *ESG* terbukti belum optimal karena indikator *ESG* Indonesia berada pada peringkat 36 dari 47 pasar modal di dunia. Gambar 1.1 menerangkan hasil survei yang dilakukan oleh Mandiri Institute yang dirilis pada tanggal 3 November 2022 menyatakan bahwa pada 190 perusahaan terbuka di Indonesia yang mengungkap baru ada 52% perusahaan dengan mengukur emisi karbon dari aktivitas biasanya. Sementara target pengurangan emisi merupakan salah satu standar krusial dalam *ESG*. Masalah utama penerapan *ESG* di Indonesia karena kesulitan menentukan indikator *ESG* yang akan digunakan, kurang paham isu *ESG* dan penerapan *ESG* dinilai mahal dari segi biaya konsultan serta kompleks (Cana, 2023). Selain itu, di Indonesia sendiri isu kesetaraan *gender* belum sesuai aturan dan masih berupa sebuah formalitas pasalnya jabatan yang diisi wanita pada perusahaan Indonesia belum mencapai 50% dari total direksi yang mana satu atau dua orang saja dalam jajaran direksi. Faktanya, dengan semakin besarnya partisipasi perempuan dalam dewan direksi perusahaan, mereka akan lebih mungkin untuk mengeluarkan dana dan melaporkan kegiatan-kegiatan sosial dan lingkungan dan/atau memilih proyek-proyek sosial yang mana hal tersebut dapat meningkatkan legitimasi perusahaan. Oleh sebab itu, implementasi *ESG* pada variabel kesetaraan *gender* di Indonesia masih terbilang belum maksimal (Rezy, 2022).

Gambar 1. 1
Tantangan Penerapan *ESG* di Indonesia



Sumber: Mandiri Institute (2022), Diolah oleh Penulis (2024)

Namun dengan keberadaan wanita dalam jajaran dewan direksi ternyata mampu meningkatkan pengungkapan *ESG*. Hal ini karena wanita dipercaya mampu untuk menanggapi tekanan publik, menjangkau berbagai pemangku kepentingan, dan mengamankan penerimaan masyarakat (Aryssi *et al.*, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Wasiuzzaman & Wan Mohammad (2020) menemukan dewan direksi wanita berpengaruh positif dikarenakan posisi wanita di dewan diharapkan dapat meningkatkan peran mengenai isu-isu sosial dan lingkungan seperti HAM, perubahan iklim dan kesetaraan pendapatan dalam strategi perusahaan karena itu lebih cenderung mendukung dan berpengaruh pada keputusan yang berkaitan masyarakat, lingkungan dan tanggungjawab sosial yang lebih kuat dibandingkan dengan lelaki sehingga mampu meningkatkan pengungkapan *ESG*. Hasil yang berkebalikan ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Cucari *et al* (2018) menyatakan bahwa dewan direksi wanita berpengaruh negatif dalam pengungkapan

ESG dikarenakan semakin tinggi proporsi jumlah wanita dalam dewan direksi maka semakin rendah *ESG disclosure* dilakukan, hal ini didukung bahwa kondisi kehadiran wanita di dewan lebih didorong oleh tekanan regulasi karena tidak sesuai dengan keahlian maka kinerja perusahaan cenderung menurun maka dari itu perusahaan akan berusaha menyembunyikan penurunan kinerja tersebut sehingga terjadi penurunan dalam *ESG disclosure*.

Selain itu, pengungkapan *ESG* juga dipengaruhi oleh struktur kepemilikan perusahaan. Struktur kepemilikan menjadi salah satu indikator untuk menggambarkan identitas suatu perusahaan dan berkontribusi terhadap pengawasan institusional dan mempengaruhi motif perusahaan dalam mengungkapkan informasi (Al Amosh & Khatib, 2022). Struktur kepemilikan ini mencakup kepemilikan Institusional dan kepemilikan Asing. Kepemilikan institusional dinilai memiliki *power* untuk mengawasi praktik pengungkapan perusahaan sehingga semakin tinggi persentase kepemilikan institusional, maka semakin tinggi *ESG* diungkapkan (Roestanto et al., 2022). Namun, kepemilikan institusional dapat juga mengurangi tingkat *ESG disclosure* karena kepemilikan institusional cenderung lebih mendorong kinerja keuangan perusahaan yang berorientasi pada produktivitas perusahaan sehingga kegiatan sosial dipandang sebagai kegiatan yang kurang baik karena pemborosan (Agustina & Lestari, 2022). Selanjutnya, kepemilikan asing yang dinilai paling *concern* menyangkut pengungkapan CSR perusahaan, hal ini dikarenakan kepemilikan asing memiliki tingkat pengawasan manajemen perusahaan yang tinggi mengenai kegiatan maupun aktivitas sosial (Yani & Suputra, 2020).

Sementara itu, terdapat faktor-faktor dapat menjadi lebih kuat atau lemah pengaruhnya terhadap *ESG disclosure* ketika perusahaan memiliki keterkaitan dengan faktor politik yaitu terdiri dari dewan direksi wanita, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing. Perusahaan di Indonesia sejak orde lama hingga saat ini memiliki keterkaitan dengan politik yang mana koneksi ini dapat dikaitkan adanya kedekatan dengan salah satu dewan direksi atau pemilik perusahaan yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan. Keberadaan wanita dalam direksi lebih dipercaya akan meningkatkan *ESG disclosure* karena lebih memberikan perspektif untuk menangani masalah sosial dibanding dengan dewan lelaki yang berorientasi terhadap kinerja keuangan (Arayssi *et al.*, 2020).

Dengan adanya koneksi politik pada dewan direksi wanita akan memiliki orientasi sosial lebih kuat daripada tidak terhubung secara politik yang mana tujuan utama pemerintah adalah untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dan stabilitas. Ideologi semacam itu cenderung menembus ke dalam orientasi nilai individu, membuat orang yang terhubung secara politik sangat berorientasi pada kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dewan direksi wanita yang terhubung secara politik cenderung lebih peduli terhadap masalah sosial dan berbagai pemangku kepentingan seperti komunitas lokal, lingkungan, karyawan, dan pelanggan sehingga semakin tinggi pengungkapan tanggung jawab sosial akan lebih diungkapkan (Wang *et al.*, 2021). Selain itu, perusahaan yang terafiliasi dengan politik akan diawasi secara lebih ketat sehingga perusahaan cenderung mematuhi peraturan pemerintah yang mana hal tersebut akan meningkatkan komitmen perusahaan dalam aktivitas operasionalnya sesuai dengan norma/nilai yang ada di

dalam masyarakat atau lingkungan yang dibuktikannya dengan perusahaan mengeluarkan laporan non-keuangan seperti *ESG disclosure* (Jurnali & Melissa, 2022).

Selanjutnya terdapat faktor yang terduga lainnya yang mempengaruhi yaitu kepemilikan asing maupun kepemilikan institusional yang mana para investor akan lebih mempercayakan menanamkan modalnya pada perusahaan yang terkoneksi politik karena para investor membutuhkan jaminan keamanan dari pemerintah sehingga peran pemerintah ini akan memfasilitasi dan menjamin proteksi seperti mendapatkan informasi secara langsung mengenai UU ataupun peraturan dibawahnya yang dibuat pemerintah bersama anggota dewan perusahaan yang mana kondisi perusahaan akan stabil dan kondusif sehingga para investor merasa aman dalam menyalurkan modalnya (Ali *et al.*, 2022). Selain itu, peran pemerintah dan para investor sejalan yang mana akan mendesak perusahaan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan dikarenakan akan memudahkan pemerintah sebagai regulator dan para investor yang menuntut standar tinggi dalam melaporkan informasi non keuangan seperti *ESG disclosure* untuk meningkatkan legitimasi perusahaan tersebut (Juwono & Mayangsari, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh dewan direksi wanita terhadap *ESG disclosure* yang dilakukan oleh Arayssi *et al* (2020), Wasiuzzaman & Wan Mohammad (2020), Van Hoang *et al* (2021), Naciti (2019), Matitaputty & Davianti (2020), dan Wang *et al* (2021) menyatakan berpengaruh positif, namun berbeda dengan penelitian oleh Manita *et al* (2018), Cucari *et al* (2018) dan Husted & Sousa-Filho (2019) yang menyatakan berpengaruh negatif. Selanjutnya

penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh kepemilikan intitusional yang dilakukan oleh Roestanto *et al* (2022) dan Nofsinger *et al* (2019) menyatakan berpengaruh positif, namun pada penelitian yang dilakukan oleh Yang *et al* (2023), Cheng *et al* (2022) dan Agustina & Lestari (2022) menyatakan berpengaruh negatif. Selain itu, penelitian selanjutnya yang dilakukan mengenai pengaruh kepemilikan asing yang dilakukan oleh Al Amosh & Khatib (2022), Fuadah *et al* (2022), Sandri *et al* (2021), Garanina & Aray (2021), Yani & Suputra (2020) menyatakan berpengaruh positif, namun pada penelitian yang dilakukan oleh Abu Qa'dan & Suwaidan (2019) menyatakan berpengaruh negatif. Namun, penelitian-penelitian tersebut hampir semuanya belum mengkaitkan hubungan antar variabel tersebut dengan koneksi politik. Padahal koneksi politik memiliki peran yang cukup penting terhadap *ESG disclosure*. Beberapa literatur menjelaskan bahwa koneksi politik dinilai dapat memperlemah atau memperkuat transparansi *ESG disclosure*. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menguji peran koneksi politik sebagai variabel yang memoderasi pengaruh antara dewan direksi wanita dan struktur kepemilikan terhadap *ESG disclosure*.

1.2 Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, dapat diketahui keterkaitan dengan isu-isu berikut ini:

1. *ESG Disclosure* yaitu pelaporan yang berfokus pada kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang sangat diperlukan untuk diterapkan

perusahaan yang mana hal tersebut dapat sebagai penjamin bagi investor dari tindakan oportunistik manajemen yang merugikan perusahaan.

2. Dewan direksi wanita dijadikan simbol isu kesetaraan untuk menanggapi tekanan publik, menjangkau berbagai pemangku kepentingan, dan mengamankan penerimaan masyarakat.
3. Struktur Kepemilikan adalah salah satu indikator terpenting untuk menggambarkan identitas suatu perusahaan dan berkontribusi terhadap pengawasan institusional dan memengaruhi motif perusahaan dalam mengungkapkan informasi.
4. Koneksi politik sebagai variabel moderasi untuk mengetahui apakah komposisi dewan dan struktur kepemilikan akan memperkuat atau memperlemah *ESG Disclosure*.

1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti membatasi masalah agar pembahas tidak meluas dan lebih spesifik. Penulis memilih masalah dewan direksi wanita, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing sebagai variabel yang diduga mempengaruhi *ESG Disclosure*. Penelitian ini menggunakan data dari perusahaan *IDXEnergy* periode 2020-2022.

1.2.3 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah

1. Apakah dewan direksi wanita berpengaruh terhadap *ESG Disclosure*?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *ESG Disclosure*?

3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *ESG Disclosure*?
4. Apakah koneksi politik memoderasi pengaruh dewan direksi wanita terhadap *ESG Disclosure*?
5. Apakah koneksi politik memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap *ESG Disclosure*?
6. Apakah koneksi politik memoderasi pengaruh kepemilikan asing terhadap *ESG Disclosure*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Menguji secara empiris pengaruh dewan direksi wanita terhadap *ESG Disclosure*.
2. Menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap *ESG Disclosure*.
3. Menguji secara empiris pengaruh kepemilikan asing terhadap *ESG Disclosure*.
4. Menguji secara empiris pengaruh koneksi politik mampu memoderasi pengaruh dewan direksi wanita dengan *ESG Disclosure*.
5. Menguji secara empiris pengaruh koneksi mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institusional dengan *ESG Disclosure*.
6. Menguji secara empiris pengaruh koneksi mampu memoderasi pengaruh kepemilikan asing dengan *ESG Disclosure*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi pada:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian mengenai pengaruh komposisi dewan dan struktur kepemilikan terhadap *ESG Disclosure* dan koneksi politik sebagai variabel moderasi diharapkan mampu memberikan manfaat seperti menambahkan wawasan atau pengetahuan mengenai topik ini. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu ekonomi khususnya akuntansi dan diharapkan agar penelitian ini kedepannya dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktisi

1. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman sebagai kaidah atas dasar manajemen perusahaan dalam rangka penyusunan laporan indikator kinerja *ESG*.

2. Bagi Stakeholders

Hasil dari penelitian ini agar bisa menjadi acuan dan dasar pengambilan keputusan ekonomik bagi para pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, pemangku kepentingan lainnya dan komunitas

pemerhati lingkungan serta sosial pada perusahaan yang melakukan pengungkapan informasi *ESG* dalam laporan tahunan perusahaannya.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami dan meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat mengenai informasi pengaruh dewan direksi wanita dan struktur kepemilikan terhadap pengungkapan *ESG* serta koneksi politik sebagai variabel moderasi.

